



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **K.G.P.A.A. PAKU ALAM X**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **130050**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.202.435.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1135 m2/355 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.202.435.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.036.500.000**

1. MOBIL, UNIVERSAL CJ 7 / JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
2. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 1952, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOTOR, HONDA C 70 / SEPEDA MOTOR Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
5. MOTOR, HONDA NC11C1C A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
6. MOTOR, MAK VIPROS X / RPE125-1/ SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
7. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.5G M/T / MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. MOTOR, HARLEY DAVIDSON XL 53C SPR. CUSTO (883 CC/ SEPEDA MOTOR SOLO) Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000
9. MOTOR, HONDA NF 100 SLD / SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
10. LAINNYA, JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 LTD AT Tahun 1996,



HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

11. MOBIL, TOYOTA VOXY 2.0 CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

560.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	175.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.542.527.485
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.956.462.485
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.956.462.485

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.